

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 – 2015

Yudhi Lestanata, Ulung Pribadi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Fisipol.

Kota Yogyakarta, Indonesia Jl. Lingkar Setatan Kasihan Bantul

yudhieselotho@yahoo.co.id

ABSTRACT

Sistem pembangunan yang Bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Program PBRT adalah instrumen untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan budaya sekaligus merupakan sarana tranformasi sosial yang diharapkan mampu untuk mendongkrak keterpurukan situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang selama ini. Inovasi ini cukup menarik dan unik, karena merupakan satu-satunya model pembangunan yang ada di provinsi ntb bahkan di indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Program Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Program pembangunan berbasis Rukun Tetangga yang menjadi program unggulan dan program percontohan Kabupaten Sumbawa Barat tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan. Dari data hasil temuan dilapangan selama penulis meneliti dapat melihat bahwa program ini salah satu inovasi penting Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendongkrak keberhasilan dalam pembangunan dengan ditetapkan Pogram ini, namun tidak seperti inovasi dan harapan dalam peraturan karena dalam perjalanan ternyata program ini tidak berjalan efektif. Banyak sumberdaya yang ada yang tidak di manfaatkan.penulis berharap supaya program ini tetap ada dan di bangkitkan kembali semangat para aktor pembangunan dalam memaksimalkan program PBRT ini.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengembangan Masyarakat

ABSTRACT

Focused on the development system capacity and capability of the public has a strong resistance when hit by problems. PBRT program is an instrument to encourage the realization of economic, social, political and cultural as well as a means of social transformation that is expected to be able to boost the slump situation and conditions of the community that had developed over time. This innovation is quite interesting and unique, because it is the only model of development in the province ntb even in Indonesia. The approach used in this study is deductive method qualitative descriptive analysis. This type of research tried to describe the actual picture of the phenomenon occurring in the management of the Neighborhood Program Based in West Sumbawa regency.

From hasil research note that based development program Rukun Tetangga being featured program and the pilot program the West Sumbawa regency was not effective as expected. From the data findings during authors examined the field can see that the program is one of the important innovations of West Sumbawa Regency in boosting success in the development of this program set, but do not like innovation and hope in the rules for the way it turned out this program has not been effective. Many existing resources that are not in memanfaatkan. penulis hope that this program still exist and revived the spirit of development actors in maximizing this PBRT program.

Keywords: Effectiveness, Community Development

1. PENDAHULUAN

PBRT merupakan program prioritas sekaligus unggulan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan telah menjadi wacana dan diskursus yang menarik dari berbagai kalangan, bukan hanya warga masyarakat di KSB, melainkan pula dari Kabupaten/Kota lainnya di NTB, dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Pelaksanaan program ini secara umum adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada disetiap lingkungan RT melalui proses pemberdayaan dan penguatan warga desa dan RT. Semangat yang melatar belakangi RT sebagai basis pembangunan dilatar belakangi oleh sejarah, kedudukan, peran dan fungsi RT selama ini. RT merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga, posisi RT sebagai pondasi sekaligus ujung tombak dalam proses pembangunan.

Kedudukan dan peran RT yang strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat telah dijadikan sebagai sarana atau salah satu instrumen penting bagi Penjajah Jepang melakukan proses pembodohan masyarakat dan mampu mempertahankan keamanan lingkungan.

Melalui keberadaan dan peran RT pula, pemerintah orde baru berhasil mempertahankan dan memenangkan pemilu dari orde ke orde, dari RT ini pula kita bisa menyaksikan bagaimana prakarsa gotong royong dan swadaya masyarakat yang murni itu terbangun dan fakta-fakta lainnya. Fungsi dan peran RT di Indonesia sesungguhnya sangatlah strategis dan potensial dalam rangka mendorong sebuah proses perubahan sosial, ekonomi bahkan politik dan keamanan lingkungan. Kemana arah kebijakan dan perubahan yang akan dicapai atau dituju dari kedudukan dan peran RT yang strategis tersebut. Semuanya itu akan sangat tergantung dari sejauh mana pemerintah daerah menempatkan posisi dan peran RT, serta bagaimana kehendak masyarakat terhadap peran dan fungsi RT saat ini.

Beberapa tahapan proses pelaksanaan proses pembangunan berbasis RT di tingkat RT

1. Sosialisasi. Sebagai tahap awal dari pelaksanaan kebijakan PBRT, pengurus RT harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pelaksanaannya dan tujuan dari dilaksanakannya PBRT.
2. Pemetaan sosial (menyusun gambaran umum keadaan warga di lingkungan RT) pemetaan sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang keadaan setiap warga, memahami nilai-nilai, sikap dan sejarah perkembangan warga setempat, serta memahami para aktor (warga) yang ada di lingkungan itu.
3. Mengidentifikasi masalah dan harapan warga menggali informasi dan mencatat berbagai macam permasalahan yang terjadi di lingkungan warga, mendiskusikan bersama warga untuk menemukan akar masalah dari masalah.

Dalam meningkatkan partisipasi semua warga, telah dilakukan penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah lembaga RT, yaitu sebanyak 612 RT pada tahun 2006, meningkat menjadi 622 RT pada tahun 2007 dan pada tahun ini telah meningkat menjadi 695 RT. (sumbawabaratkab.go.id diakses tanggal 18 maret 2015)

Sistem pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Semua persoalan akan terjawab dengan peran serta aktif masyarakat di mana setiap mekanisme pembangunan dilalui dengan musyawarah warga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keswadayaan. Di samping itu, sistem pembangunan seperti PBRT akan mampu menutup celah terjadinya penyelewengan kekuasaan karena program-program pembangunan direncanakan, diselenggarakan sekaligus diawasi (dievaluasi) oleh masyarakat secara langsung. (*harian kobar*, diakses tanggal 15 maret 2015)

Dari berbagai harapan masyarakat dengan keberadaan Program Pembangunan Berbasis RT, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perkembangan program tersebut dalam proses implementasi sehingga peneliti berinisiatif melakukan analisis sejauh mana kebijakan PBRT dijalankan dan apa yang menjadi masalah selama program berjalan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 - 2015?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga tahun 2014 - 2015?

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dan menganalisa tentang efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 - 2015.
2. Menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik.

1. Sebagai bahan kajian ilmiah tentang Program Pembangunan Berbasis RT.
2. Sebagai sumber data bagi peneliti berikutnya khususnya tentang data-data tentang Program Pembangunan Berbasis RT.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengevaluasi kebijakan Program Pembangunan Berbasis RT.
2. Sebagai bahan evaluasi dan kajian bagi semua *stakeholders* yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap efektivitas Program Pembangunan Berbasis RT.

IV. Kerangka Teori

a. Efektivitas

efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Campbell J.P. (1970), Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah : Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh.. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan di teliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dalam mengukur efektivitas akan dilakukan dengan teliti karena tujuan program yang berobyek pada masyarakat sangat luas dan abstrak.

b. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1997), selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 1994).

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut Arif Budiman (1996: 2) ada 4 cara mengukur pembangunan yaitu:

1. Kekayaan rata-rata : Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti *pertumbuhan ekonomi*. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara negara tersebut setiap tahunnya.
2. Pemerataan : Segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki, atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk didalam kemiskinan.
3. Kualitas kehidupan : Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolok ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Yang mengukur tiga indikator ,yakni: (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun (2) rata-rata jumlah kematian bayi (3) rata-rata prosentasi buta dan melek huruf.
4. Kerusakan Lingkungan : Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya
5. Keadilan Sosial Kesenambungan : Demikianlah, tolok ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negar, kini menjadi semaki kompleks. Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor

keadilan sosial (pemerataan pendapatan) dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan.

Teori pembangunan tersebut di atas lebih menekankan aspek perubahan sosial sebagai tujuan dari proses pembangunan. Perubahan sosial ini hanya bisa dicapai melalui proses yang matang dan terencana dari unit pemerintahan yang besar sampai yang kecil atau pemerintah pusat sampai ke tingkat desa. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda yang netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya.

c. Definisi Pengembangan Masyarakat

Alfitri (2011: 31) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa aktivitas pengembangan masyarakat dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri tanpa terjadi ketergantungan dengan pihak luar. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan, sehingga kegiatan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang dan tidak berhenti pada waktu dan kondisi tertentu.

Luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Strategi dasar pengembangan masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat yaitu dengan mencari cara untuk dapat memotivasi warga masyarakat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. (Hikmat, 2006: 67). Partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam pengembangan itulah yang menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila warga masyarakat penuh dengan kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif berarti tanda-tanda perubahan pun sudah tercapai.

d. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2009: 60) merupakan upaya pemerintah mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Suharto (2005: 60) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pembangunan

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. Starman, (Kunarjo, 2002: 126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (1) peranan pendamping, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) kemampuan kelompok sasaran.

a. Peranan pendamping

Starman (Kunarjo, 2002: 126) mengemukakan bahwa peranan pendamping dalam pengembangan kelompok sasaran antara lain (1) membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intrern dengan memantapkan aspek keorganisasian (2) membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dieklola sebagai usaha produktif (3) sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang termanfaatkan dari luar.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat dikenal sejak dulu, partisipasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus didorong. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja karena dana pemerintah terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun.

Bentuk (tahap) partisipasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2000: 26), sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi,
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan,

c. Kemampuan kelompok sasaran

Dunn (2002: 162) mengemukakan bahwa “Kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan

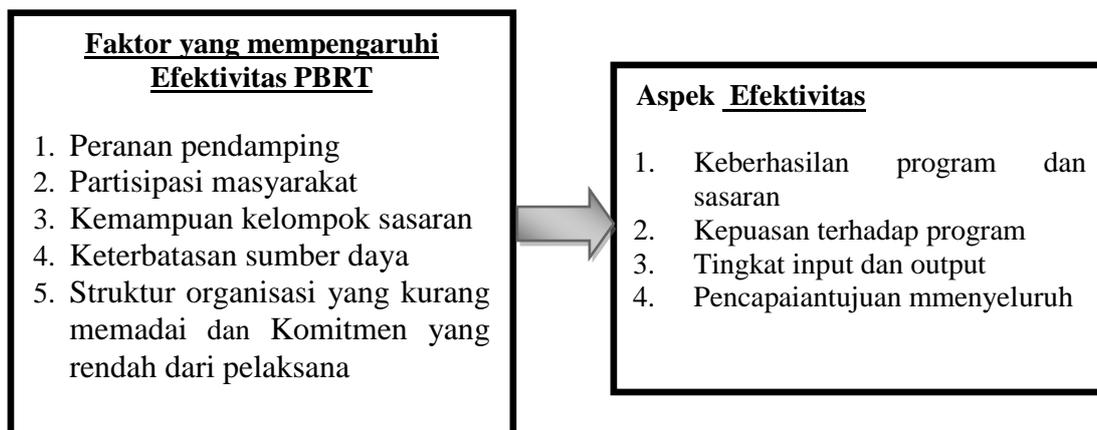
memberikan akibat”. Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas guna memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan

Program pembangunan lahir dari adanya suatu kebijakan. Jadi berbicara mengenai program tentu akan membicarakan mengenai kebijakan yang mendasari lahirnya program tersebut. Peters (Tangkilisan, 2003: 22) mengemukakan bahwa “penyebab kegagalan implementasi kebijakan, meliputi: “(1) Kurangnya informasi, (2) isi (tujuan) kebijakan tidak jelas, (3) pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan yang cukup, (4) pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas.” Sejalan dengan itu Bardach (Tarigan, 2007:25) menyatakan bahwa “Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai, dan komitmen yang rendah dari pelaksana.”

Gambar 1.

Kerangka Pikir Teoritik



V. Definisi operasional

II.5.1. Aspek – aspek Efektivitas PBRT

1. Keberhasilan program dan sasaran.
 - a. Penyelenggaraan pembangunan
 - b. Peran aktif masyarakat
2. Kepuasan terhadap program.
 - a. Mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat
 - b. Program harus yang direpresentasikan
3. Tingkat input dan output.
 - a. Tingkat input

- b. Tingkat output.
- 4. Pencapaian tujuan secara menyeluruh
 - a. Musyawarah warga/rembug warga di tingkat RT.
 - b. Tepat sasaran

II.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas PBRT

1. Peranan pendamping
 - a. Intensifitas membantu kelompok sasaran
 - b. Kualitas mengidentifikasi dan pendampingan
2. Partisipasi masyarakat
 - a. Peran aktif dalam program
 - b. Keefektifan dalam rapat dan kegiatan
3. Kemampuan kelompok sasaran
 - a. Kualitas kelompok sasaran
 - b. Pendidikan
4. Keterbatasan sumber daya
 - a. Pelibatan para pihak Pemangku Kepentingan
 - b. ranah civil society (pemerintah, swasta, masyarakat/LSM, perguruan tinggi, dan mass media)
5. Struktur organisasi yang kurang memadai dan Komitmen yang rendah dari pelaksana.
 - a. Diintegrasikan dalam kegiatan SKPD terkait.
 - b. Efektifitas kinerja pengelola

VI. Metode Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Program Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti disampaikan Satori dan Komariah (2013:28) yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Langkah kerja mendeskripsikan suatu obyek fenomena, atau setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk gambar atau angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu dengan melakukan Observasi. Dalam penelitian ini, proses observasi dilakukan sebanyak dua (2) kali yakni observasi sebelum dan pada saat penelitian dilakukan. Observasi pra-penelitian dilakukan dengan

tujuan mengamati situasi sejauh mana keefektifan kebijakan pemerintah terkait PBRT sebelum peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan beberapa informasi untuk menentukan variabel apa yang menarik untuk diteliti, sehingga peneliti memiliki gambaran dan kedalaman informasi mengenai obyek dan subyek penelitian seperti mengidentifikasi informen yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan serta mempelajari situasi dan kondisi obyek penelitian, sedangkan observasi pada saat penelitian dilakukan dengan metode observasi non-partisipan, yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain terkait dengan Efektivitas Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikutnya dengan metode Wawancara. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.

VII. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian Tentang efektifitas Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga ini, penulis dapat menjelaskan beberapa poin penting dalam penelitian ini. Kebijakan ini merupakan program yang tujuannya RT harus memiliki peran penting dalam pembangunan, tidak hanya menerima dan menjalankan keputusan. Tentunya belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai tanggung jawab, Tugas, pokok, dan fungsi seperti yang dibutuhkan tingkat partisipasi dan tanggung jawab aktor pembangunan baik pemerintah, swasta ataupun masyarakat dalam mengimplementasikan program PBRT supaya target yang diharapkan dapat tercapai tidak hanya sebatas angan-angan, akan tetapi implementasi harus ditekan sehingga kebijakan pemerintah tersebut mampu dipertanggung jawabkan dan keberhasilan program yang harus diutamakan. Untuk memaksimalkan PBRT harus dimulai dari partisipasi seperti rebug RT, gotong royong dan lain-lain.

Dalam pembahasan penulis dapat menjelaskan beberapa hal dari hasil analisis yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas PBRT yaitu, (1) Peranan Pendamping yang kurang sehingga menyebabkan terjadinya stagnan dalam implementasi Program sehingga terjadi ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan, ada beberapa pendamping yang ditugaskan untuk menjadi fasilitator program yang tergabung dalam Tenaga Sukarela Terdidik (TKST) dan Kader Pendampingan Masyarakat (KPM) mereka ditugaskan satu RT masing-masing satu kader pendamping, namun dalam berlangsung tidak berjalan maksimal. Perangkat RT berjalan sendiri tanpa pendampingan sehingga keefektifan program tidak maksimal (2) Partisipasi masyarakat yang menjadi harapan keberlangsungan PBRT masih membutuhkan perhatian karena ketidak fahaman terhadap kebijakan PBRT menyebabkan masyarakat sebagai tujuan utama program masih terkesan kurang kompak sehingga membutuhkan banyak perhatian dan pemahaman, mengerti apa yang dimaksud

dengan model Pembangunan Berbasis Rukun tetangga (3) Keterbatasan Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia yang masih tergolong minim menjadi bumerang untuk keberlangsungan PBRT. (4) Struktur Organisasi yang kurang memadai terlihat RT sebagai mitra kerja pemerintah diberikan tugas dan fungsi yang sangat terbatas dan tidak sesuai dengan perintah yang ada di dalam Perda dan panduan PBRT, para pihak pemangku kepentingan harus benar-benar menjalankan program sejalan dan tidak mengurangi dan menambah porsi, pemerintah selaku penentu kebijakan sudah membagi tugas sesuai lahan kerja masing-masing (5) Komitmen yang rendah dari pelaksana yaitu dari Inovasi PBRT dan model pembangunan Berbasis Rukun Tetangga banyak yang tidak sejalan seperti dana stimulan RT sebagai pendukung proses tidak berjalan maksimal. Banyak yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan program seperti LSM, Perguruan tinggi dan swasta Tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan PBRT belum semua unsur dilibatkan terutama dari pihak LSM, swasta serta masyarakat dan terkesan pemerintah berjalan dalam lingkaran sendiri langsung ke RT.

Dari beberapa faktor di atas penulis mengalisa bahwa program pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat tidak berjalan efektif seperti yang menjadi mimpi Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten percontohan dari program ini. Terlihat ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak efektifan seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas. Pemerintah selaku pemangku kepentingan memang harus serius dalam menjalankan kebijakan ini karena di inovasi dan Model PBRT menjelaskan beberapa keunggulan PBRT dibanding kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai indikator yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas program pembangunan berbasis rukun tetangga di kabupaten Sumbawa Barat dengan study kasus di kecamatan Taliwang, Brang Ene dan Maluk tidak efektif dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah Program Unggulan dan program percontohan Kabupaten Sumbawa Barat yang mampu menjadikan kabupaten Sumbawa Barat menempati IPM tertinggi di NTB Pada tahun pertama pelaksanaan karena program ini langsung menyentuh kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk Masyarakat. Akan tetapi dari hasil temuan penulis saat meneliti yaitu PBRT Tidak berjalan maksimal seperti penjelasan berikut: pelaksanaan PBRT belum semua unsur dilibatkan terutama dari pihak LSM, swasta serta masyarakat dan terkesan pemerintah berjalan dalam lingkaran sendiri langsung ke RT.

2. Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat dari program ini dilihat dari harapan dan kenyataan tidak sejalan, seperti dalam program ini rembug RT sudah tidak lagi aktif, insentif ketua RT tidak ada kejelasan sehingga terlihat sama seperti RT sebelum PBRT
3. Dana Stimulan tidak lagi menjadi prioritas yang mendukung kinerja RT, yang membuat para ketua RT dan masyarakat RT jenuh, karena dengan dukungan dana stimulan bisa menjadi peyemang terutama dalam gotong royong dan rapat-rapat RT
4. Program yang awalnya sangat di puji karena mampu merangkul masyarakat secara langsung, sekarang kesannya terabaikan, kelompok pendamping yang bentuk tidak jelas kerjanya.
5. Sasaran yang di tuju dalam PBRT sudah tepat akan tetapi fungsi dari sasaran dimaksud tidak maksimal sehingga menghambat keberlangsungan
6. Keterlibatan stakeholder tidak terlihat secara maksimal, sesuai dengan perda no 27 tahun 2008 yang mengatur tentang program tersebut alkhhusus berkaitan dengan siapa saja yang harus terlibat atau dilibatkan didalam implementasi program tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan HG ketua BDP desa seloto, bahwa yang terlibat didalam implementasi program tersebut hanya BPM PEMDES DAN BAPPEDA yang terlibat sedangkan stakeholder lainnya tidak dimaksimalkan perannya.
7. Pada tahun 2008 pemerintah kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan peringkat pertama dalam hal indeks pembangunan manusia se propinsi berkat program pembangunan berbasis rukun tetangga, namun sangat disayangkan pada periode kedua program tersebut tidak terimplementasi dengan baik dan maksimal sehingga program tersebut seakan hilang dari perhatian pemerintah kabupaten Sumbawa Barat.
8. Keterbatasan Sumber Daya yang membuat kurang efektifnya proses Seperti penentuan Ketua RT sebagai garda terdepan dalam Program PBRT tidak sesuai pada tempatnya. Banyak yang tidak menempuh pendidikan di tunjuk sebagai ketua RT, padahal pada dasarnya kebijakan ini di fokuskan untuk menjalankan pembangunan mulai dari RT, dan beda dengan RT yang hanya numpang nama tanpa memperhatikan tingkat pendidikan dan ilmunya.

Daftar Pustaka

- [1]. Budiman, Arif, *Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- [2]. Campbell, JP, Dunnette, MD, Lawler, EE, & Weick, KE. *Managerial behavior, performance, and effectiveness*. New York: McGraw-Hill, (1970)
- [3]. Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002

- [4]. Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia. .
- [5]. Masniadi, R & Davd K., *Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat*, Universitas Mataram dan David Kaluge Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, 2011
- [6]. Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung., 2014.
- [7]. Mustofa, Sahrul *Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga*. Kerjasama Pemkab KSB dan LEGITIMID KSB.Taliwang. 2008
- [8]. Mustofa, Syahrul, *Menata Model Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT)*, Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat Desa, 2010.
- [9]. Ndraha, Taqliziduhu., *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990
- [10]. Saladien, *Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember, 2006.
- [11]. Satori, Djam'an, dan Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013
- [12]. Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia. 2009
- [13]. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- [14]. Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- [15]. <http://www.sumbawabarakab.go.id/v/pemerintahan/program-strategis/pbrt-the-ksb-s-model.html>
- [16]. <http://kobarksb.com/?p=106#sthash.D0IbOBtU.dpbs>